

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Setelah berakhirnya perang Irak versus Iran yang berlangsung sejak tahun 1980-1988, negara Irak kemudian mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar akibat dari perang yang berkepanjangan. Banyaknya biaya yang digunakan semasa memerangi Iran membuat Irak mengalami kerugian dalam negeri hingga hutang luar negeri. Kondisi Irak juga semakin diperparah dengan adanya tindakan Kuwait dan Uni Emirat Arab yang dituduh telah menohok Irak dari belakang dengan cara membanjiri minyak dunia sehingga membuat Irak mengalami kerugian sekitar 14 miliar dollar AS (Ruslin, 2013). Banyaknya alat-alat militer yang tersisa yang dibeli dari AS di tahun 1980-an dan sempat digunakan oleh Irak untuk memerangi lawannya seperti Iran dan suku Kurdi semakin mempermudah Irak untuk menyerang Kuwait tepat pada tanggal 2 Agustus 1991 (Kuncahyono, 2005).

Meski serangan Irak ke Kuwait mendapat teguran dari PBB namun hal tersebut tidak di respon oleh Irak hingga akhirnya memicu kemarahan dari AS. Konflik yang pada mulanya merupakan konflik antara Irak-Kuwait kemudian berkembang menjadi konflik AS-Irak atau lebih tepatnya menjadi konflik Bush dan Saddam Hussein. Hal ini disebabkan karena timbulnya kekhawatiran AS yang merasa kepentingannya di Timur Tengah terancam akibat dari tindakan Irak sehingga membuat AS membentuk operasi Badai Gurun bersama dengan sekutunya yang bertujuan untuk mengusir tentara militer Irak dari Kuwait. Tepat pada tanggal 17 Januari 1991, operasi Badai Gurun yang didesain oleh AS dan sekutunya menghancurkan Baghdad dan berhasil mengusir tentara Irak dari Kuwait (Noor, 2014).

Sejak AS ikut terlibat dalam perang antara Irak-Kuwait atau sering juga di sebut sebagai Perang Teluk, hubungan AS

dan Irak mulai merenggang dan di perparah dengan adanya tuduhan terhadap Irak yang diduga memiliki senjata pemusnah massa (Winarno, 2015). Selain itu, Irak juga dituduh oleh AS telah mendukung kelompok teroris yaitu kelompok Al-Qaeda yang dianggap oleh AS sebagai kelompok teroris yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi 9/11 di Washington, AS (Francais, 2016). Amerika Serikat menganggap *persuit of international dan national interest* sebagai alasan utama bagi AS untuk menyerang Irak. Meski tuduhan atas kepemilikan senjata pemusnah massal belum pasti ditemukan namun AS tetap berjuang keras untuk menyerang Irak. Pada 19 maret 2003 AS bersama dengan sekutunya yaitu Inggris, Australia, dan Spanyol mulai menginvasi Irak. Pasca invasi militer tersebut, AS menempatkan pasukan militernya sekitar lebih dari 150.000 pasukan yang menduduki Irak secara paksa, berhasil menumbangkan partai Baath (Diana Puspita, 2013) kemudian tiga tahun berikutnya Saddam Hussein dihukum mati pasca invasi tersebut (Gunawan, 2014).

Sebagai dampak dari invasi AS, Irak kemudian mengalami kekosongan kekuasaan yang menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan di Irak baik itu sosial, ekonomi maupun politik. Seperti yang diketahui bahwa di Irak terdapat dua kelompok yaitu kelompok bermazhab Sunni yang mendukung penuh Saddam Hussein yang berasal dari partai Baath, dan kelompok kedua yaitu para penentang Saddam Hussein yang sebagian besar berasal dari golongan yang bermazhab Syiah yang juga merupakan kelompok yang tertindas semasa pemerintahannya. Setelah berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, masyarakat yang sebelumnya tertindas akhirnya mulai melakukan perlawanan terhadap para kelompok pro Saddam Husein (Sahide, 2013). Masing-masing kelompok baik pendukung Saddam Hussein yang merupakan golongan bermazhab Sunni maupun dari golongan Syiah bersaing untuk menonjolkan kelompok mereka masing-masing di Irak sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara di antara rakyat Irak itu sendiri (Katzman, 2010).

Iran sebagai salah satu negara penganut mazhab Syiah terbesar di dunia serta menjadi salah satu musuh utama Irak di Timur Tengah, kemudian menggunakan kekosongan kekuasaan di Irak untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan Afrika (Guzansky, 2011). Sebagai langkah awal, Iran memulai misinya dalam bidang politik yaitu dengan memberi dukungan kepada partai oposisi Saddam Hussein yaitu partai Al-Da'wa yang kemudian berhasil menempatkan Nouri Al-Maliki sebagai Perdana Menteri di Irak. Keberhasilan dukungan Iran menempatkan koalisi kelompok Syiah di Irak dinilai sangat penting yaitu dengan harapan apabila Irak dikuasai oleh koalisi kelompok Syiah maka kebijakan pemerintahan yang diambil oleh Irak akan sepemahaman dengan Iran sehingga memberi keuntungan bagi Iran untuk terus bisa memperluas hegemoninya di Timur Tengah (Respati, 2015).

Pasca berakhirnya rezim otoriter Saddam Hussein, Iran aktif memasukkan senjata ke beberapa wilayah di Timur Tengah termasuk ke Irak melalui gerakan-gerakan pemberontakan Irak seperti Al-Quds. Gerakan yang menjadi Pengawal Revolusi Islam Iran tersebut tercatat sejak tahun 2003 atau pasca tumbangannya rezim otoriter Saddam Hussein, dinilai aktif mengirim senjata ke beberapa wilayah di Timur Tengah seperti Lebanon, Suriah, Palestina, Irak, Yaman, dan Sudan di Afrika. Di Irak sendiri, Iran memiliki tujuan khusus seperti jaminan keamanan bagi Iran agar tidak berada pada tingkat ancaman yang tinggi seperti pada masa pemerintahan Saddam Hussein, memperkuat pengaruh dan dominasi Syiah di Irak, melawan pengaruh Barat, Turki, serta negara-negara muslim Arab lainnya di kawasan Timur Tengah, serta berusaha untuk memposisikan Irak sebagai basis utama dalam memproyeksi pengaruh Iran di Timur Tengah (Riandi, 2016). Kebijakan transfer senjata yang dilakukan oleh Iran dianggap sebagai metode yang paling efektif bagi Iran dalam mengakomodasi politik luar negeri serta kepentingannya dalam menjaga keamanan Iran dari berbagai ancaman dari luar

Iran terkhusus Barat dan negara-negara muslim di kawasan Timur Tengah (Riandi, 2016).

Selain memperkuat dukungan di beberapa wilayah di Timur Tengah dan Afrika, Iran juga tercatat sejak tahun 2006 atau sejak masa kepemimpinan Ahmadi Nejad kembali aktif dalam pengembangan teknologi Nuklir. Pada bulan Januari tahun 2006, Dewan Keamanan Nasional Iran yang diwakili juru bicaranya mengumumkan bahwa Iran bersama dengan Rusia akan kembali memulai proses negosiasi terkait kelanjutan program nuklirnya. Nuklir merupakan salah satu sumber alternatif dalam pasokan sumber daya alam yang melimpah sehingga dengan adanya pemanfaatan energi nuklir akan menghemat pengeluaran bahan bakar, batu bara, serta minyak bumi. Hal inilah yang kemudian mendorong Iran pada masa kepemimpinan Ahmadi Nejad untuk memulai kembali mengembangkan program nuklir yang mana diharapkan program nuklir tersebut dapat memacu kemajuan dan perkembangan masyarakat Iran. Namun demikian, upaya pengembangan nuklir tersebut mendapat tentangan dari AS dengan tuduhan bahwa tujuan pengembangan nuklir Iran bukan untuk tujuan damai melainkan untuk membuat senjata pemusnah massal (Kiki Mikail, 2019). Meski pengawasan nuklir atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) telah menyatakan nuklir Iran belum berada pada tingkat untuk menghasilkan senjata nuklir. Pengayaan nuklir Iran hanya sampai dalam kadar 3,5 persen yang artinya pencapaian uranium belum mampu untuk menghasilkan bom nuklir. Meski demikian, AS masih khawatir jika nantinya program nuklir Iran dapat menghasilkan senjata nuklir. AS yang merasa terancam dengan eksistensi Iran di Timur Tengah terus mencoba untuk menekan program nuklir Iran dengan tuduhan ingin menciptakan senjata pemusnah massal kemudian berusaha untuk mempengaruhi dan mengajak negara-negara lain agar memberi sanksi kepada Iran atas program nuklirnya yang dinilai bisa membahayakan dunia. Meski Iran terus berupaya meyakinkan pada dunia internasional bahwa

program nuklirnya bertujuan damai, namun melalui DK PBB, AS kemudian berhasil memberikan sanksi ekonomi berupa embargo kepada Iran sehingga melemahkan perekonomian Iran (Putri, 2016).

Keadaan Iran yang semakin memburuk akibat dari sanksi dan embargo dari AS kemudian mendapat keringanan setelah Hassan Rouhani terpilih sebagai pemimpin Iran yang selanjutnya. Hassan Rouhani yang dianggap sebagai presiden yang moderat dan terbuka terutama dengan program nuklir Iran kemudian mengajak negara-negara p5+1 yang terdiri dari Amerika, Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Jerman untuk membicarakan permasalahan terkait program nuklir Iran (Saragih, 2017). Perundingan yang berlangsung selama 20 bulan akhirnya memperoleh kesepakatan untuk mengurangi kemampuan pengayaan nuklir Iran yang kemudian memberikan imbalan bagi Iran berupa pencabutan sanksi ekonomi dari negara-negara yang telah memberi sanksi (Mikail, 2018).

Meski Iran telah bebas dari sanksi dan embargo yang sempat menjatuhkan perekonomian Iran, namun permasalahan terkait program nuklir Iran kembali menuai tekanan dari AS setelah adanya pergantian pemimpin di AS. Terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru AS membuat hubungan yang sempat membaik pada masa kepemimpinan Barak Obama kemudian kembali renggang setelah adanya keputusan sepihak yang diambil oleh Presiden Donald Trump. Pada bulan Mei 2018 lalu presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian JCPOA tersebut karena menganggap bahwa perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang seharusnya tidak pernah terjadi (Riki Rahman, 2019, hal. 12-14). Pada tahun selanjutnya, presiden Donald Trump juga menyoroti para pasukan Al-Quds dengan memberi tuduhan pada pasukan Revolusi Islam sebagai pasukan yang berperan aktif dalam membantu dan membiayai para teroris (Wijaya, 2019).

Hubungan kedua negara semakin memburuk dan mencapai puncaknya setelah adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh AS. Tepat pada awal tahun 2020 lalu, AS dibawah perintah Donald Trump mengirim drone tipe MQ-9 untuk menyerang dua tokoh termana yang ada di Timur Tengah yaitu jendral Qasem Sulaimani beserta satu anggota rombongannya yaitu Abu Mahdi Al-muhandis (Franedya, 2020). Dalam serangan tersebut kedua tokoh yang merupakan tokoh paling disegani di Timur Tengah khususnya di Iran tewas dalam serangan rudal tersebut. Tindakan sepihak AS itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat memicu munculnya perang dunia ketiga mengingat bahwa pemimpin Garda Revolusi Islam merupakan seorang tokoh yang sangat disegani di Timur Tengah terkhusus di wilayah Iran itu sendiri.

B. Rumusan masalah

Mengapa Amerika Serikat melakukan aksi unilateral berupa serangan militer yang menewaskan pemimpin militer Iran jendral Qasem Sulaimani?

C. Kerangka berpikir

Untuk membantu penjelasan serta pemahaman yang ada, maka penulis memerlukan kerangka berpikir, dalam hal ini penulis menggunakan:

a) Balance of power

Balance of power merupakan suatu konsep tertua dan paling fundamental dalam studi hubungan internasional (T. V. Paul, 2004). *Balance of power* merupakan aksi suatu negara untuk menahan negara lain agar tidak dominan atau kuat yang mana berpotensi mendesak negara yang lemah (Puspitarini, 2010). Teori *Balance of power* mulai berkembang

pada masa perang dunia kedua, dimana pada masa peperangan tersebut terdapat banyak kekuatan-kekuatan besar yang menggunakan perang sebagai alat yang krusial dari perimbangan kekuatan. Dengan kata lain, *balance of power* benar-benar digunakan oleh pemilik power untuk mengimbangi kekuatan diantara pihak yang berpotensi berperang.

Teori *Balance of power* didasarkan pada bangsa yang berusaha untuk bertahan hidup sebagai identitas yang independen. Tanpa adanya kekuatan, maka negara dapat tunduk kepada kekuatan lain sehingga hal ini menyebabkan negara kehilangan keamanan dan kemakmurannya. Menurut teori neorealis tentang anarkisme sebagai hasil dari sistem internasional, negara harus mampu untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kekuatan sehingga dengan hal ini dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Tanpa adanya otoritas dari negara lain, suatu negara dapat mencegah potensi dominasi yang muncul dengan cara memperkuat diri.

Suatu negara yang ingin melakukan *balance of power* dapat menumpuh dua cara yaitu pertama *external balancing* seperti membangun aliansi dengan negara-negara lain, dan kedua yaitu *internal balancing* yaitu suatu strategi mengimbangi kekuatan lawan dengan cara meningkatkan kemampuan internal militer serta memperkuat fondasi industri dan ekonomi militer negar (T. V. Paul, 2004, hal. 35).

Untuk mengaitkan teori di atas maka penulis menggunakan konsep *preemptive strike* sebagai respon Amerika Serikat dalam mencegah dominasi militer Iran di Timur Tengah. adapun konsep yang digunakan sebagai berikut:

- b) Konsep *Preemptive Strike* (serangan pendahuluan terhadap kekuatan militer)**

Strategi *preemptive strike* merupakan suatu strategi keamanan yang dilakukan dengan cara menyerang lawan terlebih dahulu sebelum lawan tersebut melakukan penyerangan (Nursita, 2017) . Strategi kewanman ini melegalkan Amerika Serikat untuk menyerang negara manapun yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS (Hasan, 2016). Doktrin *preemptive strike* atau lebih dikenal dengan sebutan doktrin Bush pada awalnya disebut sebagai doktrin Wolfowitz. Adanya sebutan Wolfowitz dalam doktrin ini dikarenakan terdapat salah satu anggota Hawkish yaitu Dudes Wolfowitz yang sejak tahun 1990 mengajukan pada AS utuk memerangi Irak namun tidak pernah berhasil (Kuncahyono, 2005).

Tragedi penyerangan AS pada 2001 lalu atau lebih tepatnya disebut sebagai tragedi 9/11 kemudian menjadi momentum terbaik bagi Wolfowitz utuk mewujudkan keinginannya untuk menyerang Irak. Dalam sebuah pidato presiden Bush George pada tahun 2002 yang menyebut negara Irak sebagai satu dari tiga negara yang menjadi “poros setan” (*axis of evil*) dengan tuduhan memiliki senjata pemusnah massal serta pendukung terorisme (Kuncahyono, 2005). Kekhawatiran AS akan munculnya Irak sebagai ancaman baru bagi keamanan nasional AS kemudian membuat AS menginvasi Irak tepat pada tanggal 9 Maret tahun 2003 sebagai saran dari para anggota kaum Hawkish agar menyingkirkan Saddam Hussein yang dianggap mendukung terorisme (Wulandari, 2015). Dari keberhasilannya mendorong presiden Bush untuk merealisasikan *preemptive strike* sebagai strategi keamanan baru AS dalam memerangi Irak membuat Dudes Wolfowitz dijuluki sebagai “The godfather of Iraq” (Kuncahyono, 2005).

Munculnya doktrin Bush yang kemudian melahirkan strategi keamanan *preemptive strike* baru

AS yang bertujuan untuk menjaga AS dari ancaman seperti serangan dari negara lain memiliki tujuh elemen penting yaitu; *Pertama*, komitmen untuk mempertahankan dunia yang unipolar, artinya AS sebagai satu-satunya negara yang tidak memiliki tandigan kekuatan didunia. *Kedua*, analisis baru tentang ancaman global seperti Terorisme serta bagaimana mengatasi ancaman tersebut. *Ketiga*, konsep *deterrence* (pencegahan) seperti penumpukan senjata untuk melawan musuh seperti yang dilakukan pada masa perang dingin dianggap sudah tidak mampu lagi untuk menjamim keamanan AS sehingga konsep lama seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan.

Keempat, pembongkaran dan penyusunan ulang pengertian kedaulatan sebagai dampak dari munculnya doktrin kemanan baru. Hal ini penting untuk dilakukan karena teroris tidak menghormati negara (perbatasan) sehingga untuk bisa mempertahankan keamanan negara, tindakan intervensi dinilai sebagai tindakan efektif dalam melawan terorisme. *Kelima*, startegi baru itu merupakan depresiasi umum terhadap aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian internasional serta kemitraan keamanan internasional.

Keenam, AS bersedia untuk memainkan secara penuh dan secara leluasa dalam menghadapi ancaman-ancaman dari para lawan mainnya. Pendirian ini didasarkan atas keyakinan bahwa tidak negara ataupun koalisi yang dapat menghadapi teroris kecuali AS. *Ketujuh*, dalam visi strategi baru, AS berpendapat bahwa stabilitas internasional perlu untuk dinilai ulang. AS menganggap bahwa perlunya membangun pandangan-pandangan baru tentang stabilitas karena pandangan baru dianggap bisa lebih agresif dalam melawan kekuatan maupun ancaman dari luar (Kuncahyono, 2005).

D. Hipotesa

Amerika Serikat melakukan aksi unilateral berupa serangan militer yang menewaskan pemimpin militer Iran jendral Qasem Sulaimani bertujuan untuk mencegah dominasi kekuatan militer Iran di Timur Tengah.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

- a) *library research* yakni memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari buku, artikel, jurnal dan berita yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.
- b) *Media research*, yakni proses pengumpulan data tambahan melalui berbagai berita di media baik dari media cetak maupun media online yang ada di internet.

F. Sistematika penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kepentingan Amerika Serikat Di Balik Serangan Terhadap Jendral Qasem Sulaimani.

BAB III Penutup, pada bab ini dibahas mengenai yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya.